

IMPLEMENTASI PROGRAM BEDAH RUMAH DI KABUPATEN DELI SERDANG

TESIS

OLEH

**FERI SEPNANDA GINTING
NPM. 121801031**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)19/8/22

IMPLEMENTASI PROGRAM BEDAH RUMAH DI KABUPATEN DELI SERDANG

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

**FERI SEPNANDA GINTING
NPM. 121801031**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/22

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang

N a m a : Feri Sepnanda Ginting

N P M : 121801031

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Warjio, MA

Pembimbing II



Drs. Kariono, MA

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Dr. Warjio, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah di uji pada Tanggal 16 Juni 2014

N a m a : Feri Sepnanda Ginting

N P M : 121801031



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Drs. Usman Tarigan, MS

Sekretaris : Isnaini, SH, M.Hum

Pembimbing I : Dr. Warjio, MA

Pembimbing II : Drs. Kariono, MA

Penguji Tamu : Drs. Robinson Sembiring, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/22

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 16 Juni 2014

Yang menyatakan,



Feri Sepnanda Ginting

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM BEDAH RUMAH DI KABUPATEN DELI SERDANG

FERI SEPNANDA GINTING
NPM. 121801031

Program bedah rumah di Deli Serdang dimulai tahun 2010 dan direncanakan bisa mencakup 10 ribu unit rumah pada akhir 2015. Pelaksanaan bedah rumah warga kurang mampu di daerah itu merupakan bagian dari Gerakan Deli Serdang Membangun (GDSM). Melalui GDSM, sudah ribuan unit rumah warga miskin selesai dibedah. Selain bedah rumah, sejumlah ruas jalan dan sarana infrastruktur pendidikan maupun kesehatan di daerah itu dibangun dan ditingkatkan kualitasnya. Optimalisasi kinerja GDSM tidak terlepas dari semangat kebersamaan antara Pemkab setempat dengan elemen masyarakat dan sektor dunia usaha. Pelaksanaan bedah rumah dilaksanakan secara bertahap dan mencakup hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Program gerakan bedah rumah yang dicanangkan tersebut, kini sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh sebagian warga kurang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang dan faktor apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam Implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu mengetahui implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang, yang dilihat dari aspek : komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan dan struktur birokrasi, menganalisis hambatan-hambatan dalam implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi Program Bedah Rumah Studi di Kabupaten Deli Serdang yang dilihat dari aspek komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan dan struktur birokrasi, telah berjalan dengan baik dalam arti bahwa implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang tersebut telah berjalan secara telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan.

Kata kunci : implementasi, bedah rumah

ABSTRACT

HOUSE SURGERY PROGRAM IMPLEMENTATION IN THE DISTRICT DELI SERDANG

FERI SEPNANDA GINTING
NPM. 121801031

Surgical program in Deli Serdang house began in 2010 and is planned to include 10 thousand housing units by the end of 2015. Implementation of the surgical poor people in the area are part of a movement Deli Serdang Building (GDSM). Through GDSM, already thousands of housing units completed dissected the poor. In addition to a house surgeon, a number of roads and means of education and health infrastructure in the area was built and improved quality. Optimizing the performance GDSM not be separated from the spirit of togetherness between the local district government with elements of society and the business sector. Implementation of the surgical implemented in stages and covers almost all districts in Deli Serdang. Program surgical movements that proclaimed the house, now widely felt by some residents less.

The problem of this research is how the implementation of the Surgical House in Deli Serdang and what factors become obstacles in the House Surgery Program Implementation in Deli Serdang. While the goal to be achieved in this research is to know the implementation of the Surgical House in Deli Serdang, as seen from the aspect: communication, resources, trends and bureaucratic structure, analyze the barriers in the implementation of House Surgery Program in Deli Serdang.

Based on the research implementation Surgery Programme Home Study in Deli Serdang seen from the aspect of communication, sources, trends and bureaucratic structures, has been running well in the sense that the implementation of the Program Surgical House in Deli Serdang regency has been run has been conducted in accordance with the planned.

Keywords: mplementation, surgical

KATA PENGANTAR

Program bedah rumah di Deli Serdang dimulai tahun 2010 dan direncanakan bisa mencakup 10 ribu unit rumah pada akhir 2015. Pelaksanaan bedah rumah warga kurang mampu di daerah itu merupakan bagian dari Gerakan Deli Serdang Membangun (GDSM). Melalui GDSM, sudah ribuan unit rumah warga miskin selesai dibedah. Selain bedah rumah, sejumlah ruas jalan dan sarana infrastruktur pendidikan maupun kesehatan di daerah itu dibangun dan ditingkatkan kualitasnya. Optimalisasi kinerja GDSM tidak terlepas dari semangat kebersamaan antara Pemkab setempat dengan elemen masyarakat dan sektor dunia usaha. Pelaksanaan bedah rumah dilaksanakan secara bertahap dan mencakup hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Program gerakan bedah rumah yang dicanangkan tersebut, kini sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh sebagian warga kurang.

Program bedah rumah ini terus mengharapkan dukungan dari semua pihak baik tokoh agama maupun kelompok masyarakat. Dalam penyeleksian rumah yang ingin dibedah, pemerintah mulai dari pemerintah Desa dan Kecamatan selalu diharapkan untuk selektif dalam melakukan pemilihan dimana ada beberapa klasifikasi rumah yang bisa dibedah.

Dalam Penyelesaian Tesis ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. A. H. M. Ya'kub Matondang, MA, Rektor Universitas Medan Area.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Warjio, MA, Ketua Program Studi MAP, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Drs. Kariono, MA sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan pandangan dalam proses penyusunan tesis penulis. Kiranya mendapatkan imbalan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan harapan Penulis semoga tesis ini dapat lebih bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2014
Penulis

FERI SEPNANDA GINTING

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK..... i

ABSTRACT..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR..... viii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Perumusan Masalah 4

1.3 Tujuan Penelitian 5

1.4 Manfaat Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6

2.1 Kebijakan Publik..... 6

BAB III METODE PENELITIAN32

3.1 Bentuk Penelitian32

3.2 Populasi Sasaran.....32

3.3 Rencana Sampling.....32

3.4 Teknik Pengumpulan.....33

3.5 Operasionalisasi Variabel.....34

3.6 Teknik Analisa Data.....35

BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG36

4.1 Letak dan Keadaan Geografi.....36

4.2 Kondisi Topografi36

4.3 Iklim37

4.4 Batas-Batas Dan Luas Wilayah Per Kecamatan38

4.5 Luas Jenis Tanah Dan Penggunaan Lahan 41

4.6 Strategi Pembangunan Daerah 42

4.7 Arah Kebijakan 53

BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA 59

5.1 Hasil Penelitian 59

5.2 Analisis Data 82

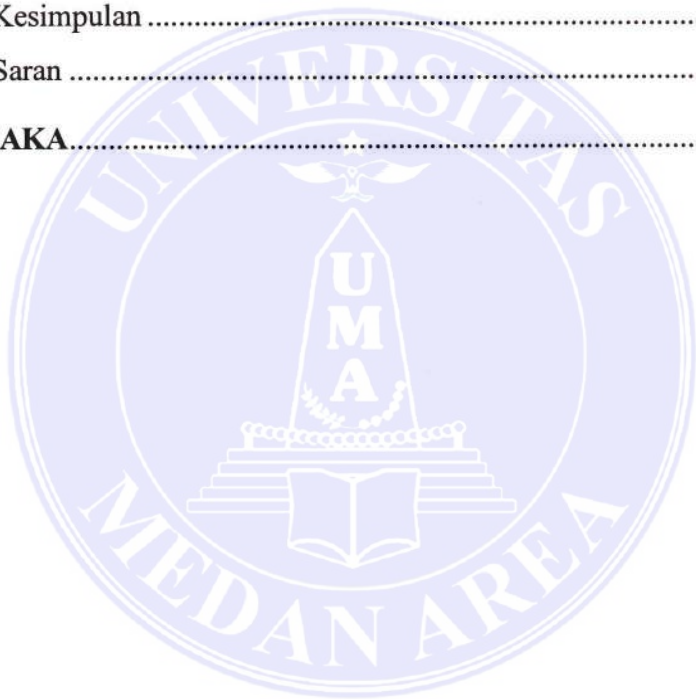
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 90

6.1 Kesimpulan 90

6.2 Saran 91

DAFTAR PUSTAKA..... 92

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1. Luas Wilayah Dan Rasio Terhadap Luas Kabupaten Deli Serdan Menurut Kecamatan 39

Tabel 4.2. Nama Ibu Kota Kecamatan dan Jarak Ibukota Kecamatan ke Lubuk Pakam..... 40

Tabel 4.3. Penggunaan Lahan di Kabupaten Deli Serdang..... 41



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Proses Analisis Kebijakan Publik..... 12

Gambar 2. Kerangka Analisis Kebijakan Publik 29

Gambar 3. Kerangka Proses kebijakan Publik 31



B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Deli Serdang dikenal sebagai salah satu daerah dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten yang memiliki keanekaragaman sumber daya alamnya yang besar sehingga merupakan daerah yang memiliki peluang investasi cukup menjanjikan. Tahun 2004 Kabupaten ini mengalami perubahan baik secara Geografi maupun Administrasi Pemerintahan, setelah adanya pemekaran daerah dengan lahirnya Kabupaten baru Serdang Bedagai sesuai dengan U.U. No. 36 Tahun 2003, sehingga berbagai potensi daerah yang dimiliki ikut berpengaruh. Dengan terjadinya pemekaran daerah, maka Luas wilayahnya sekarang menjadi 2.497,72 KM² terdiri dari 22 kecamatan dan 403 desa/kelurahan. Kabupaten ini dihuni penduduk yang terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Melayu, Deli Serdang, Simalungun, Jawa, Toba, Minang, Cina, Aceh dan pemeluk berbagai agama seperti Islam, Kristen, Hindu dan Budha, dengan total jumlah penduduk berjumlah 1.079.861 jiwa (2010) dengan Laju Pertumbuhan Penduduknya (LPP) sebesar 2,74 persen dengan kepadatan rata-rata 616 jiwa perkilometer persegi (BPS, 2012).

Dengan mengandalkan potensi sumber daya alam dan manusia yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus berupaya melakukan pengembangan sektor-sektor pembangunan dalam mewujudkan visinya yaitu

untuk mencapai “Deli Serdang yang maju dan mandiri, dengan masyarakatnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

yang sejahtera, religius, dan bersatu dalam kebhinnekaan melalui pemerataan pembangunan, pemanfaatan sumber daya yang adil dan penegakan hukum yang ditopang oleh tata pemerintahan yang baik”. Melalui Visi ini, maka salah satu Misi yang dikedepankan untuk menjadi skala prioritas pembangunan yang ditangani secara khusus adalah sektor Pendidikan dan Kesehatan tanpa mengabaikan sektor lainnya seperti dibidang ekonomi dan infrastruktur sebagai bagian terpenting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Untuk peningkatan kualitas gedung Sekolah Dasar (SD) sejak tahun 2005, Pemkab Deli Serdang, telah melakukan terobosan penting di bidang pendidikan, dengan mencanangkan Konsep “CERDAS” yaitu Percepatan Rehabilitasi dan Apresiasi terhadap Sekolah, yang didukung melalui adanya Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan termasuk bidang Kesehatan (GM-PPK).

Gerakan ini dapat tumbuh secara spontan di tengah-tengah masyarakat di semua Kecamatan untuk menyahtui konsep ini, sehingga terbentuk kekuatan Tiga Pilar Pembangunan yaitu Pemerintah, Sektor Swasta dan Masyarakat yang bersinerji menjadi alternatif solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan pembangunan di Sektor Pendidikan dan Kesehatan. Melalui sinergitan itu pula, banyak sarana infrastruktur di Kabupaten Deli Serdang berpenduduk sekitar 1,9 juta jiwa itu berhasil direalisasikan melalui Gerakan Deli Serdang Membangun (GD SM) yang dicanangkan Amri Tambunan sejak tahun 2004.

Pada awal maret 2010, Bupati Deli Serdang mulai mencanangkan program bedah 10 ribu rumah tidak layak huni, gerakan bedah rumah tidak layak huni merupakan salah satu bentuk program pembangunan yang menyentuh langsung

UNIVERSITAS MEDAN AREA

kepada masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Upaya perbaikan dan penataan terhadap rumah yang tidak layak huni, akan memberikan kenyamanan hidup sehat dan efektif mengangkat taraf hidup warga miskin. Sebagian besar kegiatan bedah rumah difasilitasi Pemerintah Kabupaten (Pemb) setempat bersama masyarakat dan sektor dunia usaha. Program bedah rumah bertujuan untuk memperbaiki kualitas rumah warga yang kurang mampu, dari yang semula kumuh menjadi rumah layak huni.

Program bedah rumah di Deli Serdang dimulai tahun 2010 dan direncanakan bisa mencakup 10 ribu unit rumah pada akhir 2015. Pelaksanaan bedah rumah warga kurang mampu di daerah itu merupakan bagian dari Gerakan Deli Serdang Membangun (GDSM). Melalui GDSM, sudah ribuan unit rumah warga miskin selesai dibedah. Selain bedah rumah, sejumlah ruas jalan dan sarana infrastruktur pendidikan maupun kesehatan di daerah itu dibangun dan ditingkatkan kualitasnya. Optimalisasi kinerja GDSM tidak terlepas dari semangat kebersamaan antara Pemb setempat dengan elemen masyarakat dan sektor dunia usaha. Pelaksanaan bedah rumah dilaksanakan secara bertahap dan mencakup hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Program gerakan bedah rumah yang dicanangkan tersebut, kini sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh sebagian warga kurang.

Program bedah rumah ini terus mengharapkan dukungan dari semua pihak baik tokoh agama maupun kelompok masyarakat. Dalam penyeleksian rumah yang ingin dibedah, pemerintah mulai dari pemerintah Desa dan Kecamatan selalu

diharapkan untuk selektif dalam melakukan pemilihan dimana ada beberapa klasifikasi rumah yang bisa dibedah.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Implementasi Program Bedah Rumah Di Kabupaten Deli Serdang.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam Implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk :

- 1) Mengetahui Implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang, yang dilihat dari aspek : komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan, dan struktur birokrasi .
- 2) Menganalisis hambatan-hambatan dalam Implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

- 1) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan khususnya tentang kebijakan Implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang.
- 2) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khasanah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penelitian di bidang implementasi kebijakan publik.

B A B II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu.

Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memegang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002).

Untuk memahami lebih jauh bagaimana kebijakan publik sebagai solusi permasalahan yang ada pada masyarakat, kita harus memahami dulu apa dan seperti apa kebijakan publik itu sendiri. Berikut adalah definisi-definisi kebijakan publik menurut para ahli kebijakan publik.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/22

Thomas R. Dye (1981) memberikan pengertian dasar mengenai kebijakan publik sebagai apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian ini kemudian dikembangkan dan diperbaharui oleh ilmuwan-ilmuwan yang berkecimpung di ilmu kebijakan publik sebagai penyempurnaan karena arti itu jika diterapkan, maka ruang lingkup studi ini menjadi sangat luas, disamping kajiannya yang hanya terfokus pada Negara sebagai pokok kajian.

Easton (1969) memberikan pengertian kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Sedangkan Anderson (1975) memberikan definisi kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah: 1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan – tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2)kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah; 3)kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; 4) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negative dalam merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

5) kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Sedangkan menurut Woll (1966) kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah yaitu; 1) adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat; 2) adanya output kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat; 3) adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Jadi pada dasarnya studi kebijakan publik berorientasi pada pemecahan masalah riil yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian analisis kebijakan publik secara umum merupakan ilmu terapan dan berperan sebagai alat atau ilmu yang berusaha untuk memecahkan masalah. Pada konteks ini kebijakan publik memiliki beragam perspektif, pendekatan maupun paradigma sesuai dengan fokus dan lokus dari obyek penelitian atau obyek kajian.

Istilah kebijakan publik sesungguhnya dipergunakan dalam pengertian yang berbeda-beda. Hugh Heclo (1972) mengatakan bahwa Kebijakan adalah cara

bertindak yang sengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/22

Jones (1977) menekankan studi Kebijakan Publik ini pada 2 (dua) proses, yaitu:

- a. Proses-proses dalam ilmu politik, seperti bagaimana masalah-masalah itu sampai pada pemerintah, bagaimana pemerintah mendefinisikan masalah itu, dan bagaimana tindakan pemerintah.
- b. Refleksi tentang bagaimana seseorang bereaksi terhadap masalah-masalah, terhadap Kebijakan Negara, dan memecahkannya.

Menurut Charles O. Jones (1977) Kebijakan terdiri dari komponen-komponen:

- Goal atau tujuan yang diinginkan,
- Plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan,
- Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan, Decision atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- Efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).

Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam hubungannya dengan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat, kebijakan adalah keputusan-keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah – masalah yang telah diutarakan. Atau dapat juga Kebijakan diartikan sebagai suatu keputusan untuk mengakhiri atau menjawab pertanyaan yang diajukan kepada kita. Helco (1972) menggunakan istilah kebijakan itu secara luas, yakni sebagai rangkaian

tindakan pemerintah atau tidak bertindakya pemerintah atas sesuatu masalah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Jadi lebih luas dari tindakan atau keputusan yang bersifat khusus. Henz Eulau dan Kenneth Previt (1973) merumuskan Kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat kebijakan dan yang melaksanakannya.

Selanjutnya Jones (1977) memandang Kebijakan Publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya sedikit demi sedikit. Prinsip-prinsip pendekatan Jones (1977) tersebut adalah membuat Kebijakan dan yang melaksanakannya.

- a. Kejadian-kejadian dalam masyarakat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda oleh organisasi yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda.
- b. Banyak masalah yang timbul karena adanya peristiwa yang sama
- c. Ada berbagai tingkatan atau harapan yang harus dilalui kelompok penekan untuk memasuki proses Kebijakan yang ada.
- d. Tidak semua masalah-masalah publik menjadi agenda pemerintah.
- e. Banyak juga kepentingan elit yang diangkat menjadi isu kebijakan dalam pemerintahan.
- f. Banyak masalah-masalah tidak dipecahkan oleh pemerintah, baik sengaja maupun tidak.
- g. Pembuatan Kebijakan tidak berhadapan dengan kelompok yang ada di masyarakat.
- h. Banyak pengambilan keputusan didasarkan pada informasi dan komunikasi yang kurang akurat.

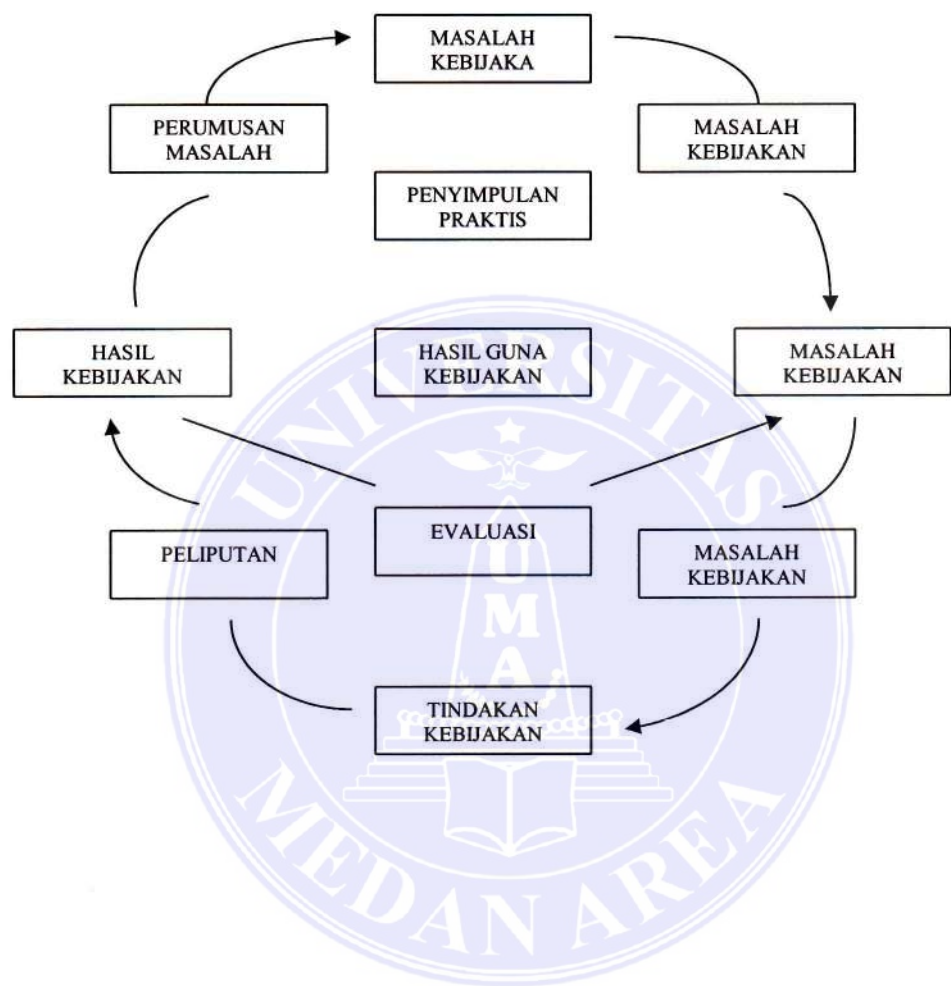
- i. Kebijakan yang dibuat sering direfleksikan sebagai konsesus, daripada substansi dari pemecahan masalah
- j. Terjadi perbedaan dalam mendefinisikan kebijakan antara Pembuat Kebijakan dengan masyarakat yang terlibat.
- k. Banyak program yang dibuat dan dilaksanakan tidak seperti yang dirancang.
- l. ORganisasi yang ada dalam masyarakat memiliki kepentingan dan focus yang berbeda.

2.1.2. Proses Analisis Kebijakan Pblik

Proses analisis kebijakan secara umum merupakan suatu proses kerja yang meliputi lima komponen informasi kebijakan yang saling terkait dan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan berbagai teknik analisis kebijakan (Dunn, 1994) seperti berikut ini:

Bagan 1

Proses Analisis Kebijakan Publik



Sumber : Tangkilisan : Kebijakan Publik Yang Membumi, 2000

Bagan dari proses analisis kebijakan tersebut di atas terjadi secara akumulatif antara komponen informasi dan teknik analisis yang digunakan untuk menghasilkan dan memindahkannya. Penggunaan teknik-teknik analisis kebijakan (perumusan masalah, peramalan, peliputan, evaluasi, rekomendasi) memungkinkan analisis memindah salah satu tipe informasi ke informasi lainnya secara berkesinambungan. Informasi dan teknik saling bergantung, dimana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

keduanya terkait dalam proses pembuatan dan perubahan yang dinamis melalui transformasi informasi kebijakan (policy informational transformations). Pada konteks ini komponen informasi kebijakan (masalah kebijakan, alternative kebijakan, tindakan kebijakan, hasil kebijakan, dan hasil guna kebijakan) ditransformasikan dari suatu posisi ke posisi lainnya dengan menggunakan teknik analisis kebijakan.

Dalam memecahkan masalah masalah yang dihadapi kebijakan publik, Dunn (1994) mengemukakan bahwa ada beberapa tahap analisis yang harus dilakukan yaitu penetapan agenda kebijakan (agenda setting); formulasi kebijakan (policy formulation); adopsi kebijakan (policy adoption) isi kebijakan (policy implementation), dan evaluasi kebijakan (policy assesment). Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Agenda Setting

Tahap penetapan agenda kebijakan ini, yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Pada hakekatnya permasalahan ditemukan melalui proses problem structuring. Woll (1966) mengemukakan bahwa suatu isu kebijakan dapat berkembang menjadi agenda kebijakan apabila memenuhi syarat berikut ini :

1. Memiliki efek yang besar terhadap kepentingan masyarakat;
2. Membuat analog dengan cara memancing dengan kebijakan publik yang pernah dilakukan;
3. Isu tersebut mampu dikaitkan dengan symbol-simbol nasional atau politik

yang ada,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)19/8/22

4. Terjadinya kegagalan pasar (maker failure);
5. Tersedianya teknologi dan dana untuk menyelesaikan masalah publik.

Menurut Dunn (1994) problem structuring memiliki 4 fase yaitu: pencarian masalah (problem search), pendefinisian masalah (problem definition), spesifikasi masalah (problem specification) dan pengenalan masalah (problem setting). Sedangkan teknik yang dapat dilakukan untuk merumuskan masalah adalah analisis batasan masalah, analisis klarifikasi, analisis hirarki dan brainstorming, analisis multi perspektif, analisis asumsional serta pemetaan argumentasi.

2. Policy Formulation

Berkaitan dengan policy formulation Woll (1966) berpendapat bahwa formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, dimana pada tahap para analis kebijakan publik mulai menerapkan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain. Dalam menentukan pilihan kebijakan pada tahap ini dapat menggunakan analisis biaya manfaat dan analisis keputusan, dimana keputusan yang harus diambil pada posisi tidak menentu dengan informasi yang serba terbatas.

Pada tahap formulasi kebijakan ini, para analisis harus mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan melalui prosedur forecasting untuk memecahkan masalah yang di dalamnya terkandung konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan yang akan dipilih.

3. Policy Adoption

Tahap adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para stakeholders atau pelaku yang terlibat. Tahap ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi dengan langkah-langkah sebagai berikut (Dunn, 1994) :

- 1) Mengidentifikasi alternative kebijakan (policy alternative) yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu bagi kemajuan masyarakat luas.
- 2) Pengidentifikasian criteria-kriteria tertentu dan terpilih untuk menilai alternative yang akan direkomendasi.
- 3) Mengevaluasi alternative-alternatif tersebut dengan menggungkan criteria-kriteria yang relevan (tertentu) agar efek positif alternative kebijakan tersebut lebih besar daripada efek negative yang akan terjadi.

4. Policy Implementation

Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit eksekutor (birokrasi pemerintah) tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya (teknologi dan manajemen), dan pada tahap ini monitoring dapat dilakukan. Menurut Patton dan Sawicki⁸ (1993) bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga

dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Jadi tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dari program pemerintah.

5. Policy Assesment

Tahap akhir dari proses pembuatan kebijakan adalah penilaian terhadap kebijakan yang telah diambil dan dilakukan. Dalam penilaian ini semua proses implementasi dinilai apakah telah sesuai dengan yang telah ditentukan atau direncanakan dalam program kebijakan tersebut sesuai dengan ukuran-ukuran (criteria-kriteria) yang telah ditentukan.

Evaluasi kebijakan dapat dilakukan oleh lembaga independent maupun pihak birokrasi pemerintah sendiri (sebagai eksekutif) untuk mengetahui apakah program yang dibuat oleh pemerintah telah mencapau tujuannya atau tidak. Apabila ternyata rujukan program tidak tercapai atau memiliki kelemahan, maka pemerintah harus mengetahui apa penyebab kegagalan (kelemahan) tersebut sehingga kesalahan yang sama tidak terulang di masa yang akan datang.

Menurut Dunn (1994) evaluasi kebijakan publik mengandung arti yang berhubungan dengan penerapan skala penilaian terhadap hasil kebijakan dan program yang dilakukan. Jadi terminology evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). Dalam arti yang lebih spesifik lagi, evaluasi kebijakan berhubungan dengan produk informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dari ulasan tersebut, maka dapat diketahui sifat dari evaluasi sebagai berikut :

- 1) Fokus nilai, dimana evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dsuatu kebijakan dan program. Evaluasi merupakan upaya untu menentukan manfaat dan kegunaan social kebijakan atau program, dan bukan sekedar upaya untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat diperdebatkan, maka evaluasi mencakup juga prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.
- 2) Interdependensi fakta dan nilai, dimana tuntutan evaluasi tergantung pada fakta dan nilai untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau rendah. Untuk itu diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, sekelompok atau seluruh masyarakat, namun implikasi yang lebih luas terhadap perkembangan social yang ada. Mencapai hal ini harus didukung bukti secara actual yang merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah publik yang luas.

- 3) Orientasi masa kini dan masa lampau, dimana evaluasi bersifat retrospektif dilakukan setelah aksi-aksi dilakukan, sekaligus bersifat prospektif untuk kegunaan masa mendatang.
- 4) Dualitas nilai, dimana nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda karena dipandang mempunyai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai intrinsik atau ekstrinsik. Nilai-nilai terpolakan dalam suatu hirarki yang menggambarkan kepentingan para pelaku dan bersifat saling ketergantungan antara tujuan dan sasaran.

Menurut Ripley & Franklin (1982) tahap evaluasi harus terlebih dahulu menjawab beberapa hal berikut ini :

- 1) Pelaku atau kelompok masyarakat mana yang memiliki akses di dalam proses pembuatan kebijakan?
- 2) Apakah proses pembuatan kebijakan dilakukan secara terperinci, transparan dan memenuhi prosedur perundangan yang berlaku?
- 3) Apakah kebijakan yang berbentuk program tersebut didesain secara logis?
- 4) Apakah sumber daya yang digunakan mampu menjadi input program secara memadai untuk mencapai tujuan?
- 5) Apakah standar implementasi yang baik menurut ukuran kebijakan tersebut?
- 6) Apakah program dari kebijakan dilaksanakan sesuai standar efisiensi dan memenuhi perhitungan ekonomi” artinya lebih jauh, apakah sumber daya (financial) digunakan dan dialokasikan secara transparan dan?

- 7) Apakah kelompok sasaran (targets group) memperoleh pelayanan dan barang seperti yang didesain dalam program?
- 8) Apakah program memberikan dampak kepada kelompok lainnya? Apa jenis dampaknya?
- 9) Apa dampaknya, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan terhadap masyarakat?
- 10) Kapan tindakan program dilakukan dan dampaknya diterima oleh masyarakat?
- 11) Apakah tindakan dan dampak tersebut sesuai dengan yang diharapkan?

Dalam kaitan dengan kelompok sasaran dari program kebijakan, Kelman (1987) menyarankan tiga pertanyaan pokok sebagai berikut:

- 1) Siapa yang memperoleh akses terhadap input dan output program kebijakan?
- 2) Bagaimana program kebijakan tersebut mempengaruhi perilaku mereka?

Dengan demikian dalam melakukan kegiatan evaluasi kebijakan, seorang analis kebijakan publik akan berhubungan dengan aspek perumusan kebijakan, dimana pada aspek ini analis berusaha mencari jawaban bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, siapa yang paling berperan dan untuk siapa kebijakan tersebut dibuat. Juga aspek implementasi, kebijakan, dimana pada aspek ini analis berusaha untuk mencari jawaban bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, apa faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana kinerja dari kebijakan tersebut. Dan terakhir bagaimana melakukan suatu evaluasi yang sesuai dengan kriteria maupun ukuran yang telah ditentukan dalam desain program kebijakan bagi perbaikan maupun penyempurnaan pembuatan kebijakan publik di masa mendatang.

2.1.3. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu Kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu Kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itulah implementasi Kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam Kebijakan Publik.

Menurut George C Edward menganalisis Implementasi Kebijakan dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. dalam hal ini ada 4 (empat) factor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan :

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar.

2. Sumber Daya

Tidak masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya.

3. Disposisi atau Sikap

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien

4. Struktur Birokrasi.

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi.

Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood (1980), hal-hal yang berhubungan dengan implementasi Kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky (1984), implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

Jones (1977) menganalisis masalah pelaksanaan Kebijakan dengan mendasarkan pada konsepsi kegiatan-kegiatan fungsional. Jones (1977) mengemukakan beberapa dimensi dari implementasi pemerintahan mengenai program-program yang sudah disahkan, kemudian menentukan implementasi, juga membahas actor-aktor yang terlibat, dengan memfokuskan pada birokrasi yang merupakan lembaga eksekutor. Jadi implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan.

Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi keputusan

1. **Penafsiran** yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.
2. **Organisasi** yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan.
3. **Penerapan** yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya.

Masalah kegiatan fungsional dijelaskan oleh Jones (1977) dari sudut institusional, dimana organisasi bisa dilihat dari actor atau badan-badan yang berperan dalam implementasi program dengan memfokuskan diri pada peranan birokrasi. Penafsiran terhadap rencana kebijakan ke dalam proses implementasi hanya dilakukan oleh organisasi birokrasi pemerintah dan pihak-pihak yang lain yang terlibat dalam pelaksanaan program kebijakan. Suatu program kebijakan akan berhasil bila penafsiran oleh badan-badan eksekutif, birokrat, dan beberapa pihak lain yang terlibat dalam menyelenggarakan program-program tertentu. Suatu program dapat berlangsung dengan ditunjukkannya apakah keberadaan penafsiran masih mencukupi atau tidak.

Penafsiran yang berbeda-beda sering menimbulkan perdebatan. Meskipun demikian, perdebatan ini nantinya justru akan melahirkan suatu program baru yang lebih baik. Sedang proses aplikasinya sering dikatakan merupakan suatu proses yang dinamis dimana para pelaksana dan pemaksa pada umumnya berpedoman pada peraturan-peraturan program atau standar dan realitas yang ada. Dari sudut penafsiran dapat dilihat bahwa proses penafsiran banyak dilakukan oleh badan-badan eksekutif, birokrat, dan beberapa pihak lain yang terlihat dalam

menyelenggarakan program-program tertentu. Suatu program dapat berlangsung dengan ditunjukkannya apakah keberadaan penafsiran masih mencukupi atau tidak.

(a) Teori Implementasi Kebijakan

Analisis kebijakan publik merupakan sebuah disiplin ilmu social terapan yang menggunakan berbagai metode kebijakan publik dan argument untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan (Dunn, 1994).

Sedangkan kebijakan publik adalah hal-hal yang berhubungan dengan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapinya (Ripley dan Franklin, 1982). Sementara itu, (Dunn, 1994), Thomas R. Dye (1981), Edward (1980) dan Sharkashy (1971) mengemukakan pengertian kebijakan yang agak mirip dimana kebijakan sebagai tindakan, pilihan dan keputusan baik yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pencapaian tujuan kebijakan.

Menurut James E. Anderson (1975), “Merumuskan kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan”. Jadi konsep kebijakan ini memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan apa yang dimaksudkan dan konsep ini membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pikiran diantara berbagai alternative.

Fredrickson dan Hart (1985) mengatakan :

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang disusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Sedangkan komponen-komponen dalam kebijakan tersebut adalah : (1) Kebijakan publik, (2) Tuntutan kebijakan, (3) Keputusan kebijakan, (4) Pertanyaan kebijakan, (5) Hasil kebijakan.

Karena setidaknya ada dua (2) hal mengapa implementasi kebijakan pemerintah memiliki relevansi: (1) Secara praktis akan memberikan masukan bagi pelaksanaan operasional program sehingga dapat dideteksi apakah program telah berjalan sesuai dengan yang telah dirancang serta mendeteksi kemungkinan tujuan kebijakan negative yang ditimbulkan, (2) Memberikan alternative model pelaksanaan program yang lebih efektif.

Berdasarkan pandangan yang diutarakan diatas dapat disimpulkan, bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat akhirnya berpengaruh terhadap tujuan kebijakan, baik yang negative maupun yang positif.

Dengan demikian secara sederhana tujuan implementasi kebijakan adalah

untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

hasil dari kegiatan pemerintah (Wibawa et. Al., 1994). Selanjutnya Wibawa et.al., (1994) mengutip pendapat lain bahwa keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa mulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Kemudian dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan publik ini dikenal dengan beberapa model, antara lain:

1. Model Gogin

Untuk mengimplementasi kebijakan dengan model Goggin ini dapat mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi, yakni: (1) Bentuk dan isi kebijakan, termasuk didalamnya kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, (2) Kemampuan organisasi dengan segala sumber daya berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif, dan (3) pengaruh lingkungan dari masyarakat dapat berupa karakteristik, motivasi, kecenderungan hubungan antara warga masyarakat, termasuk pola komunikasinya (Goggin et.al., 1990).

2. Model Grindle

Sebagaimana dikutip oleh Wahab (2001) Grindle menciptakan model implementasi sebagai kaitan antara tujuan kebijakan dan hasil-hasilnya, selanjutnya pada model ini hasil kebijakan yang dicapai akan dipengaruhi oleh isi kebijakan yang terdiri dari:

(1) Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi, (2) tipe-tipe manfaat, (3) derajat perubahan yang diharapkan, (4) Letak pengambilan keputusan, (5) Pelaksanaan program, dan (6) Sumber daya yang dilibatkan. Isi sebuah kebijakan akan menunjukkan posisi pengambilan keputusan oleh sejumlah besar pengambilan kebijakan, sebaliknya ada kebijakan tertentu yang lainnya hanya ditentukan oleh sejumlah kecil unit pengambil kebijakan. Pengaruh selanjutnya adalah lingkungan yang terdiri dari: (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, (2) karakteristik lembaga penguasa, dan (3) kepatuhan dan daya tanggap. Karenanya setiap kebijakan perlu mempertimbangkan konteks atau lingkaran dimana tindakan administrasi dilakukan.

3. Model Meter dan Horn

Model implementasi kebijakan ini dipengaruhi 6 faktor yaitu: (1) Standar kebijakan dan sasaran yang menjalankan rincian tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh, (2) Sumber daya kebijakan berupa dana pendukung implementasi, (3) komunikasi inter organisasi dan kegiatan pengukuran digunakan oleh pelaksana untuk memakai tujuan yang hendak dicapai, (4) karakteristik pelaksanaan, artinya karakteristik organisasi merupakan faktor krusial yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu program, (5) kondisi sosial ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan dan (6) sikap pelaksanaan dalam memahami kebijakan yang akan ditetapkan.

4. Model Deskriptif

William N. Dunn (1994) mengemukakan bahwa model kebijakan dapat

diperbandingkan dan dipertimbangkan menurut sejumlah banyak asumsi, yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

paling penting diantaranya adalah; (1) Perbedaan menurut tujuan, (2) bentuk penyajian dan (3) fungsi metodologis model. Dua bentuk pokok dari model kebijakan adalah: (1) Model deskriptif dan (2) Model normative. Tujuan model deskriptif adalah menjelaskan dan atau meramalkan sebab dan akibat pilihan pilihan kebijakan, model kebijakan digunakan untuk memonitor hasil tindakan kebijakan misalnya penyampaian laporan tahunan tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan di lapangan.

Willian Dunn (1994) mengatakan kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kejelasan antara kebijakan dan kinerja implementasi yaitu:

- Standard dan sasaran kebijakan.
- Komunikasi antar organisasi dan pengukuran aktifitas
- Karakteristik organisasi komunikasi antar orgaisasi.
- Kondisi sosial, ekonomi dan politik
- Sumber daya
- Sikap pelaksanaan.

Selain itu Rippley dan Franklin (1982) menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga faktor yaitu:

- a. **Perspektif** kepatuhan (*compliance*) yang mengukur implementasi dari kepatuhan *stake level burcancrats* terhadap atas mereka.

- b. **Keberhasilan** implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya personal.
- c. **Implementasi** yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerimaan manfaat yang diharapkan.

Factor-faktor yang mempengaruhi kinerja kebijakan selanjutnya dapat disebutkan sebagai berikut :

- Organisasi atau kelembagaan.
- Kemampuan politik dari penguasa
- Pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang
- Kebijakan pemerintah yang bersifat tak remental.
- Proses perumusan kebijakan pemerintah yang baik
- Aparatur evaluasi yang bersih dan berwibawa serta professional.
- Biaya untuk melakukan evaluasi.
- Tersedianya data dan informasi sosial ekonomi yang siap dimanfaatkan oleh penilai-penilai kebijakan.

Peters (1982) mengatakan, implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa factor:

a. Informasi

Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.

b. Isi Keberhasilan

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketika tegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

c. Dukungan

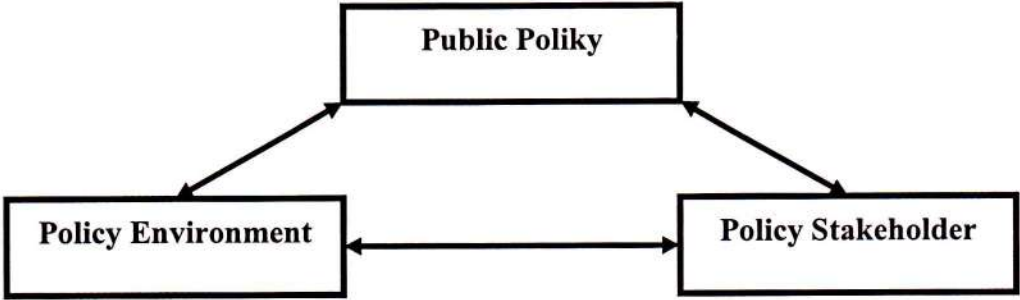
Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para actor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang.

Sebagai suatu ringkasan untuk mempermudah pemahaman kerangka pemikiran dapat tersaji dalam bagian sebagai berikut. Proses implementasi kebijakan hendaknya melalui alur seperti dikemukakan oleh Dye (1981) sebagai berikut:

Bagan 2. Kerangka Analisis Kebijakan Publik



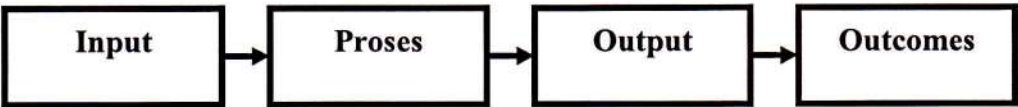
Sumber: Thormas R. Dye, Understanding Publik Policy, 3 th ed. (Englewood Ciffs, NJ; Prentice Hall, 1981)

Berdasarkan bagan / kerangka pemikiran dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

- **Publik Policy**, merupakan rangkaian pilihan yang harus lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, diformulasikan di dalam bidang-bidang isu sejak pertahanan, energi, dan kesehatan sampai pendidikan, kesejahteraan, dan kejahatan. Pada salah satu bidang isu terdapat banyak isu kebijakan, yaitu serangkaian arah tindakan pemerintah yang actual ataupun yang potensial yang mengandung konflik diantara segmen-segmen yang ada dalam masyarakat.
- **Policy stakeholder**, yaitu para individu dan atau kelompok individu yang mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Pelaku kebijakan misalnya kelompok warga Negara, perserikatan birokrasi partai politik, agen-agen pemerintah, pimpinan terpilih dan para analis kebijakan sering menangkap secara berbeda informasi yang sama mengenai lingkungan kebijakan.
- **Policy environment**, yaitu kointeks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuatan kebijakan dan kebijakan publik oleh karena itu, sistem kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, yang berarti bahwa dimensi objektif dan subjektif dari pembuatan kebijakan tidak terpisahkan di dalam prakteknya. Sistem kebijakan adalah produk manusia yang subjektif yang diciptakan melalui pilihan-pilihan yang sadar oleh para pelaku kebijakan; sistem

kebijakan adalah realitas objektif yang dimanifestasikan dalam tindakan-tindakan yang teramati berikut konsekuensinya; para pelaku kebijakan merupakan produk dari sistem kebijakan.

Bagan 3 : Kerangka Proses kebijakan Publik



1. **Input**, sumber daya-sumber daya yang digunakan sebagai ujung tombak dalam proses administrasi maupun organisasi pelaksana.
2. **Proses**, adalah proses interaksi antara actor yakni antara instansi terkait sebagai pelaksana dengan pengusaha dan masyarakat.
3. **Ouput**, yaitu keluaran yang dihasilkan langsung dari proses kebijakan tersebut.
4. **Out comes**, yaitu hasil yang diharapkan dimana akan memberikan tujuan kebijakan positif kepada pemerintah dan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Sebagaimana penjelasan tersebut diatas mengenai berbagai teori yang berkaitan dengan implementasi suatu kebijakan publik, maka factor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi dipengaruhi oleh berbagai factor, baik factor kelembagaan, perilaku para stakeholders, pengelolaan program kebijakan (manajemen kebijakan publik), factor politik, factor sosial, dan factor ekonomi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.

3.2. Populasi Sasaran

Populasi sasaran pada penelitian ini adalah seluruh komponen yang terlibat dalam Implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang yaitu Pemerintah Daerah dan masyarakat.

3.2. Rencana Sampling

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini digunakan *Purposive Sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan tertentu. Hal ini dilakukan mengingat karena obyek yang akan diteliti (sumber data) sangat luas, yaitu terdiri dari berbagai instansi terkait dalam Implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang. Adapun sampel dalam penelitian ini yang secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Bappeda	: 4 orang
2. Dinas Cipta Karya dan Pertambangan	: 6 orang
3. Pemerintah Kecamatan	: 11 orang
4. Pemerintah Desa	: 22 orang
Jumlah	: 43 orang.

3.4. Teknik Pengumpulan

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi *data primer* dan *data sekunder*. *Data primer*, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, yang diperoleh melalui :

- a. *Wawancara*, yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan *key informan* (informan kunci) secara mendalam yang dianggap mengerti permasalahan yang diteliti. *Key informan* dalam wawancara penelitian ini adalah : Bupati Kabupaten Deli Serdang, Ketua Bappeda dan Kepala Dinas Cipta Karya dan Pertambangan dan pejabat terkait lainnya.
- b. *Kuesioner*, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan dari responden melalui daftar pertanyaan tertutup dan terbuka yang diajukan.dengan menyajikan beberapa alternatif jawaban yang sudah ditentukan.
- c. *Observasi*, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Sedangkan *data sekunder*, dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu data yang diperoleh telah diolah baik dalam bentuk angka maupun berupa uraian sesuatu hal yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan bahan

informasi yang diperoleh dari instansi yang terkait dalam Implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang.

3.5. Operasionalisasi Variabel

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, perlu dirumuskan pengertian dan istilah yang digunakan untuk memperoleh batasan yang jelas dan memudahkan dalam menentukan indikatornya. Variabel dalam penelitian ini menggunakan satu variabel atau variabel tunggal, yaitu implementasi kebijakan.

Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan komponen pelaksana dalam mencapai tujuan sasaran Implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang diukur dalam Implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang, yaitu :

1. Komunikasi :

- kejelasan konsep Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang
- kejelasan tujuan/sasaran Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang
- adanya perangkat aturan yang efektif

2. Sumber-sumber :

- keahlian/kemampuan yang dimiliki komponen pelaksana Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang
- otoritas/wewenang yang ada pada pelaksana
- prasarana dan Anggaran APBD Deli Serdang

3. Struktur birokrasi :

- adanya keterpaduan komponen pelaksana dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang.

4. Hasil yang diperoleh :

- tingkat pencapaian/realisasi dari kegiatan yang dilakukan secara bertahap dapat terealisasi.

3.6. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan tabel tunggal. Untuk menganalisa data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan khususnya dari penyebaran angket akan digunakan analisa tabel tunggal atau yang disebut analisa tabel frekwensi. Analisa tabel tunggal (frekwensi) ini dimaksudkan untuk memperinci data-data sekaligus menyajikan presentase dari masing-masing jawaban reesponden, sehingga akan dapat diketahui data yang paling dominan, atau yang paling besar persentasenya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

5.1. Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan karakteristik responden yang meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan dan kedudukan dalam program. Disamping itu juga akan dijelaskan tentang variabel penelitian yaitu implementasi kebijakan Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang yang meliputi tentang : Komunikasi, Sumber-sumber, Kecenderungan-kecenderungan, Struktur birokrasi dan Hasil yang diperoleh.

5.1.1. Karakteristik Responden

Penyajian karakteristik responden bertujuan untuk mengenal ciri-ciri khusus yang dimiliki responden sehingga memudahkan peneliti untuk mengadakan analisis. Karakteristik responden dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 5.1

Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	36	83,72
2	Perempuan	7	16,28
JUMLAH		43	100,00

Sumber: Angket Penelirtian, 2014

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebahagian besar responden (83,72 persen) adalah laki-laki, dan responden yang perempuan 16,28 persen.

Tabel 5.2
Distribusi Responden Menurut Umur

No	Umur (Tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
1	20 – 30	7	16,28
2	31 – 40	22	51,16
3	41 – 50	12	27,91
4	51 - 60	2	4,65
JUMLAH		43	100,00

Sumber: Angket Penelirtian, 2014

Apabila dilihat dari umur responden secara keseluruhan, sebahagian responden (51,16 persen) adalah mereka yang berusia 31-40 tahun, sedangkan yang berusia 50 tahun ke atas sebanyak 4,65 persen. Namun apabila dilihat dari kelompok umur, yang terbanyak adalah mereka yang berada pada kelompok umur 31-40 tahun sebesar 51,16 persen dan kelompok umur 41-50 tahun sebesar 27,91 persen, sedangkan untuk kelompok umur 20-30 tahun sebanyak 16,28 persen.

Tabel 5.3
Distribusi Responden Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SLTP	7	16,28
2	SLTA	26	60,47
3	Perguruan Tinggi	10	23,26
JUMLAH		43	100,0

Sumber: Angket Penelirtian, 2014

Di lihat dari segi tingkat pendidikan formal yang ditempuh oleh responden, yang terbanyak adalah mereka yang berpendidikan SLTA (60,47

persen), 16,28 23,26 persen berpendidikan. Sedangkan bagi mereka yang pendidikannya sampai perguruan tinggi mencapai 9,30 persen.

Dilihat dari kedudukannya dalam Implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang, sebahagian besar responden adalah Pemerintah Desa (Kepala Desa) sebesar 51,16 persen kemudian diuukti oleh aparat kecamatan (25,58 persen) dan Dinas Cipta Karya dan Pertambangan sebesar 13,95 persen serta Bappeda Deli Serdang sebesar 6,30 persen.

Tabel 5.4
Distribusi Responden Menurut Kedudukan dalam Program

No	Asal Instansi	Frekuensi	Persentase (%)
1	Bappeda	4	6,30
2	Dinas Cipta Karya dan Pertambangan	6	13,95
3	Pemerintah Kecamatan	11	25,58
4	Pemerintah Desa/Kelurahan	22	51,16
Jumlah		43	100,0

Sumber: Angket Penelirtian, 2014

Dalam pelaksanaan program bedah rumah ini kedudukan Bappeda adalah sebagai badan perencana, Dinas Cipta Karya dan Pertambangan sebagai penanggung jawab, Camat sebagai koordinator pada tingkat kecamatan dan Kepala Desa/Lurah sebagai Koordinator dan penanggung jawab terhadap pelaksanaan di lapangan, karena Kepala Desa dan Lurah yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

5.1.2. Variabel Penelitian

Faktor-faktor yang diukur dalam implementasi Program Implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang adalah meliputi komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, struktur birokrasi, dan hasil yang diperoleh.

Tabel 5.5
Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Program Bedah Rumah

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mengetahui	39	90,70
2	Kurang mengetahui	4	9.30
3	Tidak mengetahui	0	0,0
JUMLAH		43	100,0

Sumber : Angket Penelirtian, 2014

Berdasarkan tabel 5.5. di atas menunjukkan bahwa sebahagian besar (90,70 persen) responden menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang adanya Program Implementasi Program Bedah Rumah Studi Kabupaten Deli Serdang yang dilaksanakan di wilayah mereka, sedangkan yang kurang mengetahi sebesar 9,3 persen dan tidak ada seorang responden pun yang menyatakan tidak mengetahui. Hal ini berarti bahwa secara umum masyarakat yang terkait dengan Implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang telah mengetahui adanya program pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perumahan.

Tabel 5.6
Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Tujuan Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mengetahui	22	91,7
2	Kurang mengetahui	2	8,3
3	Tidak mengetahui	0	0,0
JUMLAH		43	100,0

Sumber : Angket Penelitian, 2014

Pengetahuan mereka tentang Implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang terkait dengan pengetahuan tentang tujuan Program tersebut. Seperti terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya mereka yang mengetahui tujuan program adalah sama besarnya dengan mereka yang mengetahui adanya program tersebut, yaitu sebesar 90,7 persen. Demikian juga halnya dengan yang kurang mengetahui, yaitu sebesar 9,3 persen.

Seperti diketahui bahwa tujuan Program Implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang Bupati H. Amri Tambunan yang kini telah melaksanakan kepemimpinannya di daerah ini persis selama dua periode, tentu harus memacu gerakan percepatan pembangunan untuk memanfaatkan sisa waktu priode kepemimpinannya sampai dengan April tahun 2014, dan pada pada tanggal 14 April 2014 telah dilantik bupati yang baru yaitu Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars sebagai Bapati dan Wakil Bupati Deli Serdang Periode 2014-2019. Memelalui gebrakan ini berarti guna mewujudkan visinya yang cukup menantang untuk mengantarkan daerah ini ke pintu kejayaannya. Harapan ini

dilakukannya selama ini. Gerakan ini dapat tumbuh secara spontan di tengah-tengah masyarakat di semua Kecamatan untuk menyahuti konsep ini, sehingga terbentuk kekuatan Tiga Pilar Pembangunan yaitu Pemerintah, Sektor Swasta dan Masyarakat yang bersinerji menjadi alternatif solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan pembangunan di Sektor perumahan..

Tabel 5.7
Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Adanya Perangkat Aturan dalam Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mengetahui	37	86,05
2	Kurang mengetahui	6	13,95
3	Tidak mengetahui	0	0,0
JUMLAH		43	100,0

Sumber: Angket Penelirtian, 2014

Dalam kaitannya dengan tingkat pengetahuan responden tentang adanya perangkat aturan dalam program Program Implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang, sebesar 86,05 persen responden menyatakan mengetahui dan 13,95 persen lainnya menyatakan kurang mengetahui serta tidak ada seorangpun responden yang tidak mengetahuinya, seperti terlihat pada tabel 5.7 di atas.

Beberapa peraturan yang terkait dengan masalah perumahan ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan pemukiman

- 2. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.
- 3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.
- 5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Pembangunan / Rahabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 5.8
Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Adanya Peraturan Tertulis dalam Pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mengetahui	40	93,02
2	Kurang mengetahui	3	6,98
3	Tidak mengetahui	0	0,0
JUMLAH		43	100,0

Sumber : Angket Penelirtian, 2014

Berdasarkan tabel 5.8 di atas menunjukkan bahwa hampir seluruhnya (95,8 persen) responden menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang adanya aturan tertulis dalam Program Implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang, dan hanya 6,98 persen atau tiga orang responden saja

Tabel 5.9
Pendapat Responden Tentang Hak dan Kewajiban dalam Program

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Memahami	38	88,37
2	Kurang memahami	4	9,30
3	Tidak memahami	1	2,33
JUMLAH		43	100,0

Sumber: Angket Penelirtian, 2014

Sesuai dengan ketentuan tentang Implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang, dinyatakan bahwa setiap komponen pelaksana program (pimpinan proyek, konsultan, aparat pemerintah dan masyarakat) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam program tersebut.

Tabel 5.10
Pendapat Responden Tentang Perkembangan Kegiatan dalam Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mengetahui	38	88,37
2	Kurang mengetahui	5	11,63
3	Tidak mengetahui	0	0,0
JUMLAH		43	100,0

Sumber: Angket Penelirtian, 2014

Perkembangan kegiatan dalam progam Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang merupakan hal penting yang sangat menentukan dalam keberhasilan program tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sebesar 88,37 persen responden menyatakan mengetahui tentang perkembangan kegiatan tersebut dan 11,63 persen yang menyatakan kurang mengetahuinya.

Keadaan ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebahagian responden yang kurang mengetahui tentang perkembangan kegiatan-kegiatan usaha yang dikelola dalam program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan tersebut.

Hal lain yang penting dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan adalah berkaitan dengan pengaturan pengelolaan dana dan penentuan kegiatan dalam program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan.

Sumber-sumber yang penting dalam suatu pelaksanaan meliputi staf-staf dengan keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas dan informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas di dalam menerjemahkan suatu peraturan dalam pelaksanaannya. Staf tersebut haruslah memadai jumlahnya dalam melaksanakan sesuatu program, namun tidak hanya jumlah tetapi juga harus didukung oleh keahlian yang baik dalam tugas tersebut. Informasi menyangkut bagaimana melaksanakan sesuatu hal dan ketaatan dari personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Peranan pemerintah dalam penentuan cara pengelolaan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.11
Pendapat Responden Tentang Pengaturan Pengelolaan Dana dan Penentuan Kegiatan dalam Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Diatur bersama	36	83,72
2	Ditentukan oleh masyarakat	4	9,30
3	Diatur pemerintah	3	6,98
JUMLAH		43	100,0

Sumber: Angket Penelirtian, 2014

Berdasarkan tabel 5.11 di atas menunjukkan bahwa sebahagian besar responden responden (87,72 persen) menyatakan bahwa dalam menentukan cara pengelolaan dana dan penentuan jenis kegiatan semuanya ditentukan diatur bersama, sedangkan yang menyatakan diatur pemerintah sebesar 9,30 persen dan 6,98 persen lainnya menyetakan oleh masyarakat sendiri. Hal ini berarti peranan pemerintah dalam program Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang tersebut adalah masih relatif kecil sedangkan peranan masyarakat adalah cukup menentukan.

Tabel 5.12
Pendapat Responden Tentang Bentuk Aturan Pmerintah dalam Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Membimbing/mengarahkan	39	90,70
2	Mempersilahkan memilih sendiri	4	9,30
3	Memaksa/menekan	0	0,0
JUMLAH		43	100,0

Sumber: Angket Penelirtian, 2014

Untuk keberhasilan suatu program hal penting yang harus diketahui oleh

aparatur pelaksana adalah tentang kejelasan aturan yang ada. Seperti terlihat pada

tabel 5.12 menunjukkan bahwa hampir seluruhnya responden (90,70 persen) menyatakan bahwa bentuk aturan dalam Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang bersifat membimbing atau mengarahkan sehingga aparat pelaksana dapat dengan mudah melaksanakannya. Hanya terdapat satu responden saja yang menyatakan bahwa aturan tersebut menunjukkan pada pelaksanaan untuk memepersilahkan memeilih sendiri dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas lngkungan dan permukiman tersebut. Hal ini berarti bahwa aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan program peningkatan kualitas lngkungan dan permukiman telah dapat dipahami sebagai petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan program tersebut. Maksudnya disini agar porgram peningkatan kualitas lngkungan dan permukiman dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenag. Sesuai dengan peraturan berarti setiap pelaksanaan kebijaksanaan harus sesuai dengan peraturan yang berelaku baik Peraturan Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, juga sesuai dengan ketentuan yang dibuat pada tingkat teknis dan operasional.

Tabel 5.13
Pendapat Responden Tentang Ketersediaan Sumberdaya Alam dalam Mendukung Kelancaran Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mendukung	40	93,02
2	Kurang mendukung	3	6,98
3	Tidak mendukung	0	0,0
Jumlah		43	100,0

Sumber: Angket Penelitian, 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa ketersediaan sumberdaya alam yang ada belum sepenuhnya dapat mendukung kelancaran kegiatan yang dilakukan dalam program program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan tersebut. Hampir seluruhnya (93,02 persen) responden yang menyatakan bahwa ketersediaan sumberdaya alam mendukung kegiatan dilakukan. Responden yang menyatakan bahwa sumberdaya alam kurang mendukung kegiatan yang dilakukan mencapai 6,98 persen.

Tabel 5.14
Pendapat Responden Tentang Kecukupan Dana untuk Mengelola Kegiatan yang Dilakukan dalam Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Memadai	31	72,09
2	Kurang memadai	7	16,28
3	Tidak memadai	5	11,63
JUMLAH		43	100,0

Sumber: Angket Penelirtian, 2014

Hal lain yang sangat penting dalam suatu kegiatan kegiatan adalah ketersediaan dana untuk menunjang usaha tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dana yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan belum sepenuhnya dapat mencukupi kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan tersebut. Sekitar tigaperempat dari responden yang menyatakan bahwa dana yang diberikan telah memadai untuk menjalankan kegiatan yang dilakukan, sedangkan 16,28 persen lainnya menyatakan bahwa dana tersebut kurang memadai.

Hal ini berarti bahwa dana yang disediakan oleh pemerintah dalam melaksanakan Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang ternyata belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan masyarakat karena sifatnya adalah sebagai stimulan atau perangsang yang selebihya diusahakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat.

Tabel 5.16
Pendapat Responden Tentang Dukungan Prasarana untuk Mengelola Kegiatan Yang Dijalankan dalam Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mendukung	32	74,42
2	Kurang mendukung	8	18,60
3	Tidak mendukung	3	6,98
JUMLAH		43	100,0

Sumber : Angket Penelirtian, 2014

Hal lain yang juga penting untuk kelancaran suatu kegiatan atau program adalah adanya dukungan prasarana seperti transportasi yang lancar dan adanya pasar pada suatu wilayah sangat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dukungan prasarana tersebut sekitar 74,42 persen responden yang menyatakan mendukung sedangkan 18,60 persen lainnya menyatakan kurang mendukung dan tidak mendukung.

Untuk keberhasilan suatu program maka kecenderungan-kecenderungan para pelaksana sangat menentukan dalam pelaksanaan, tingkah laku mereka terhadap kebijakan dan peraturan yang telah ditentukan sebelumnya mempengaruhi hasil selanjutnya. Tingkah laku ini juga menyangkut cara pandang terhadap sesuatu hal atau kebijaksanaan. Dalam pelaksanaan program program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan di Kabupaten Deli Serdang ini adalah sangat penting dan menentukan keberhasilan Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang tersebut, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.17
Pendapat Responden Tentang Peranan Pemerintah dalam Memberikan Penyuluhan dalam Pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berperan	36	83,72
2	Kurang berperan	7	16,28
3	Tidak berperan	0	0,0
JUMLAH		43	100,0

Sumber: Angket Penelirtian, 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 83,72 persen responden menyatakan bahwa Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang (Dinas Cipta Karya dan Pertambangan,, Bappeda, aparat Kecamatan dan Desa) telah berperan dalam memberikan penyuluhan dalam pelaksnaan Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang dan 16,28 persen lainnya menyatakan kurang berperan.

Tabel 5.18
Pendapat Responden Tentang Peranan Dunia Usaha dalam Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berperan	38	88,37
2	Kurang berperan	5	11,63
3	Tidak berperan	0	0,0
JUMLAH		43	100,0

Sumber: Angket Penelirtian, 2014

Peranan dunia usaha adalah sangat penting dan mentukan untuk keberhasilan Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang karena dunia usaha sangat diharapkan dalam memberikan bantuan materinya. . Seperti terlihat

UNIVERSITAS MEDAN AREA menunjukkan bahwa sebahagian besar responden (88,37

persen) menyatakan bahwa dunia sangat bereperan dalam Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang. Responden yang menyatakan bahwa dunia usaha kurang berperan sebesar 11,63 persen dalam Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang dan tidak seorangpun responden yang menyatakan bahwa kepala desa tidak berperan dalam kegiatan tersebut.

Tabel 5.19
Pendapat Responden Tentang Peranan Masyarakat dalam Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berperan	35	81,40
2	Kurang berperan	6	13,95
3	Tidak berperan	3	6,98
JUMLAH		43	100,0

Sumber: Angket Penelirtian, 2014

Tabel di atas menunjukkan tentang peranan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang dalam Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang yang menunjukkan bahwa peranan rak Masyarakat tersebut cukup bereperan di mana 81,40 persen responden menyatakan bahwa Masyarakat berperan dalam Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang tersebut, sedangkan yang menyatakan kurang dan tidak berperan sebesar 18,60 persen.

Tabel 5.20
Pendapat Responden Tentang Peranan Kelompok Masyarakat dalam Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berperan	30	69,77
2	Kurang berperan	10	23,26
3	Tidak berperan	3	6,98
JUMLAH		43	100,0

Sumber: Angket Penelirtian, 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebesar 69,77 persen responden menyatakan bahwa Kelompok Masyarakat mempunyai peranan dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang dan 23,26 persen lainnya menyatakan kurang berperan. Peranan Kelompok Masyarakat dalam membantu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akan diajukan dan didanai oleh Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang dimulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan/penyusunan program dan samapai pada tahap pelaksanaan.

Tabel 5.21
Pendapat Responden Tentang Kualitas Kelompok Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Memadai	38	88,37
2	Kurang memadai	5	11,63
3	Tidak memadai	0	0,0
JUMLAH		43	100,0

Sumber: Angket Penelirtian, 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebesar 88,37 persen responden menyatakan bahwa kualitas Kelompok Masyarakat telah memadai dan 11,63 persen lainnya menyatakan kurang memadai. Hal ini berarti bahwa

Kelompok Swadaya Masyarakat yang telah dipilih oleh masyarakat telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Tabel 5.22
Pendapat Responden Tentang Pertemuan yang Dilaksanakan dalam Pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sering	40	93,02
2	Kadang-kadang	3	6,98
3	Tidak pernah	0	0,0
JUMLAH		43	100,0

Sumber: Angket Penelirtian, 2014

Tabel 5.22 di atas menunjukkan tentang pertemuan yang dilaksanakan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang. Sebanyak 93,02 persen responden menyatakan bahwa pertemuan tersebut sering dilakukan, artinya dalam satu minggu dilaksanakan satu kali pertemuan atau per minggu untuk membicarakan hal-hal tang berkaitan dengan pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang tersebut. Namun demikian masih terdapat 6,98 persen responden yang menyatakan bahwa pertemuan tersebut jarang dilaksanakan atau kadang-kadang saja bila diperlukan. Artinya, pertemuan tidak dilaksanakan setiap dua mingguan atau sebulan dua kali.

Tabel 5.23
Pendapat Responden Tentang Frekuensi Pertemuan Rutin yang Dilaksanakan dalam Pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Perminggu	32	74,32
2	Per dua mingguan	6	13,95
3	Perbulan	3	6,98
JUMLAH		43	100,0

Sumber: Angket Penelirtian, 2014

Seperti terlihat pada tabel di bahwa ini 74,32 persen responden menyatakan pertemuan rutin dilaksanakan per minggu dan 13,95 persen lainnya menyatakan pertemuan tersebut dilaksanakan per dua mingguan serta lainnya menyatakan pertemuan dilaksanakan per bulan.

Tabel 5.24
Pendapat Responden Tentang Keterpaduan Komponen Pelaksanaan Dalam Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ada keterpaduan	38	88,37
2	Kurang keterpaduan	5	11,63
3	Tidak ada keterpaduan	0	0,0
JUMLAH		43	100,0

Sumber: Angket Penelirtian, 2014

Tabel di atas menunjukkan tentang keterpaduan komponen pelaksana dalam Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang yang secara umum (88,37 persen) responden menyatakan ada keterpaduan. Komponen-komponen yang terlibat dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli

Serdang adalah pemerintah daerah, dunia usaha dan Kelompok Masyarakat, yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

kesemuanya merupakan komponen pelaksana. Namun demikian masih juga dijumpai adanya kurang keterpaduan diantara komponen yang terlibat, yaitu sebesar 11,63 persen responden yang menyatakan masih terjadinya kekurangterpaduan dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang tersebut. Dan berdasarkan tabel di atas tidak seorang responden pun yang menyatakan tidak ada keterpaduan dalam diantara komponen pelaksana program peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman tersebut.

Tabel 5.25
Pendapat Responden Tentang Pengaruh dari Luar Komponen yang Terlibat dalam Pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sering	10	23,26
2	Kadang-kadang	33	76,74
3	Tidak ada	0	0,0
JUMLAH		43	100,0

Sumber: Angket Penelirtian, 2014

Dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang tersebut tidak terlepas dari adanya pengaruh atau tekanan dari pihak luar komponen yang terlibat dalam pelaksanaan. Seperti terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebesar 23,26 persen responden menyatakan bahwa sering ada pengaruh atau tekanan dari pihak luar komponen pelaksana dan 76,74 persen lainnya menyatakan kadang-kadang saja adanya pengaruh atau tekanan dari pihak luar tersebut.

Sejak dilaksanakannya Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli

Serdang telah banyak kegiatan yang dilakukan masyarakat guna perbaikan sarana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pendidikan yang terjadi selama ini. Selama satu tahun terakhir ini telah banyak terjadi perkembangan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.26
Pendapat Responden Tentang Perkembangan Kegiatan dalam Satu Tahun Terakhir Pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Meningkat	41	95,35
2	Tetap	2	4,65
3	Menurun	0	0,0
JUMLAH		43	100,0

Sumber: Angket Penelitian, 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebahagian besar responden (95,35 persen) menyatakan bahwa usaha yang dilakukan selama satu tahun terakhir ini adalah meningkat dan hanya 4,65 persen saja yang menyatakan bahwa usaha mereka adalah tetap, artinya tidak terjadi peningkatan. Berdasarkan tabel tersebut juga menunjukkan bahwa tidak seorang responden pun yang menyatakan terjadi penurunan atas usaha yang mereka lakukan dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang tersebut.

Tabel 5.27
Pendapat Responden Tentang Hambatan dalam Perencanaan Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Banyak hambatan	6	13,95
2	Sedikit hambatan	22	51,16
3	Tidak ada hambatan	15	34,88
JUMLAH		43	100,0

Sumber: Angket Penelirtian, 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa lebih separunya dari responden (51,16 persen) menyatakan bahwa sedikit hambatan dalam prencanaan atau penyusunan program. Hambatan tersebut berkaitan dengan keterbatasan sumberdaya manusia yang ada, dimana pada umumnya pendidikan masyarakat desa adalah masih rendah. Sepertiga lainnya responden (34,88) menyatakan tidak ada hambatan dan yang menyatakan banyak hambatan dalam perencanaannya 13,95 persen.

Demikian juga halnya hambatan dalam pelaksanaan, lebih dari separuhnya (60,47 persen) responden menyatakan tidak ada hambatan dan 20,93 persen yang menyatakan sedikit hambatan. Responden yang menyatakan banyak hambatan sebesar 18,60 persen, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.28
Pendapat Responden Tentang Hambatan dalam Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang

No	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Banyak hambatan	8	18,60
2	Sedikit hambatan	9	20,93
3	Tidak ada hambatan	26	60,47
JUMLAH		43	100,0

Sumber: Angket Penelirtian, 2014

Hambatan utama yang masih ditemukan dalam Implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang adalah berkaitan dengan masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk mendukung program ini, menyebabkan upaya percepatan pembangunan dan renovasi rumah warga kurang mampu dilakukan secara bertahap. Di samping itu masih terdapat beberapa rumah warga yang tidak layak huni, tetapi tidak memiliki Surat Kepemilikan Hak Atas Tanah.

5.2. Analisis Data

Seperti telah dijelaskan pada bagian pendahuluan bahwa untuk mengukur implementasi Program Implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Deli Serdang terdiri dari lima indikator, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, struktur birokrasi,. Dari setiap indikator dilihat dari beberapa aspek atau pertanyaan yang semuanya ditujukan untuk lebih memahami dan menjelaskan tentang bagaimana implementasi Program Implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Deli

secara umum implementasi Program Implementasi Program Bedah Rumah Studi di Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan kriteria yang ditentukan dengan skor rata-rata adalah 2,89, maka tergolong baik, seperti terlihat pada tabel 5.29.

Namun apabila dilihat dari masing-masing indikator, menunjukkan tidak adanya perbedaan untuk masing-masing indikator tersebut. Keempat indikator menunjukkan rata-rata skornya tergolong baik yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, struktur birokrasi, hasil yang diperoleh, yang berarti implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang berjalan dengan baik.

Tabel 5.29
Rata-rata Skor Implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang

No	Implementasi Program Bedah Rumah	Rata-rata Skor	Kriteria
1	Komunikasi	2,88	Baik
2	Sumber-sumber	2,22	Sedang
3	Kecenderungan-kecenderungan	2,80	Baik
4	Struktur birokrasi	3,00	Baik
IMPLEMENTASI PROGRAM		2,89	Baik

Berdasarkan tabel 5.29 di atas terlihat bahwa dari lima indikator untuk mengukur implementasi program, hal ini berarti bahwa secara umum implementasi Program Implementasi Program Bedah Rumah Studi di Kabupaten Deli Serdang telah berjalan secara efektif atau baik sesuai dengan kriteria yang

Dengan mengandalkan potensi sumber daya alam dan manusia yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus berupaya melakukan pengembangan sektor-sektor pembangunan dalam mewujudkan **visinya** yaitu untuk mencapai **“Deli Serdang yang maju dan mandiri, dengan masyarakatnya yang sejahtera, religius, dan bersatu dalam kebhinnekaan melalui pemerataan pembangunan, pemanfaatan sumber daya yang adil dan penegakan hukum yang ditopang oleh tata pemerintahan yang baik”**.

Melalui Visi ini, maka salah satu Misi yang dikedepankan untuk menjadi skala prioritas pembangunan yang ditangani secara khusus adalah sektor perumahan dan pemukiman tanpa mengabaikan sektor lainnya seperti dibidang ekonomi dan infrastruktur sebagai bagian terpenting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Program penyelenggaraan urusan perumahan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diarahkan untuk :

1. Menyelenggarakan kapasitas penyelenggaraan urusan perumahan rakyat
2. Menciptakan kebijakan perumahan dan pemukiman yang komprehensif, terpadu, dan berperan nyata dalam memecahkan masalah perkotaan.
3. Mengembangkan kawasan pemukiman yang sehat.
4. Memperbaiki lingkungan pemukiman d kawasan padat/kumuh.
5. Meningkatkan kualitas pemukiman lingkungan dengan pembangunan kampung terpadu.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dan komunika professional dalam

urusan perumahan rakyat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)19/8/22

7. Menyelenggarakan program Gerakan Deli Serdang Membangun (GDSM).

Dengan adanya kebijakan Program Bedah Rumah tersebut, tentunya membawa dampak terhadap kualitas perumahan dan pemukiman di Kabupaten Deli Serdang, yang ditargetkan pada tahun 2015 bisa mencapai 10.000 rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni.

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan penerjemahan pernyataan kebijakan (*policy statement*) kedalam aksi kebijakan (*policy action*). Dalam Aktifitas implementasi terdapat berbagai faktor-faktor yang akan mempengaruhi terlaksananya kegiatan atau kebijakan tersebut. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi telah banyak dikemukakan oleh para ahli kebijakan diantaranya sebagaimana dikemukakan George C. Edwards III (1980). Sejalan dengan pendapat Edward III tersebut yang mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Edward III (1980) lebih lanjut mengemukakan dua premis untuk keperluan studi implementasi kebijakan yaitu prakondisi-prakondisi apakah yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi kebijakan serta hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam penerapannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut kemudian diidentifikasi faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai variabel independen yang mempengaruhi kinerja dari implementasi. Faktor-faktor tersebut meliputi empat variabel, yaitu:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1).Komunikasi; 2).Sumber daya; 3).Disposisi; dan 4).Struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut tidak hanya secara langsung mempengaruhi implementasi, akan tetapi juga tidak secara langsung masing-masing faktor berpengaruh terhadap faktor lainnya.

Implementasi kebijakan Program Bedah Rumah agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) dalam hal ini wajib pajak sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu; (1) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula (kejelasan); (2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan, dan (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

Dalam implementasi kebijakan Program Bedah Rumah harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten,

tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)19/8/22

implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Selanjutnya Wahab (2010), menjelaskan bahwa sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.

Suatu disposisi dalam implementasi Program Bedah Rumah, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Wahab (2010), menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan. Dalam kaitan dengan organisasi Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang sebagai pelaksana dan penanggung jawab

dalam program Bedah Rumah, maka peta organisasi bersifat hirarki yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi melalui lima hal harus tergambar, yaitu; (1) jenjang hirarki jabatan-jabatan manajerial yang jelas sehingga terlihat “Siapa yang bertanggungjawab kepada siapa?”; (2) pelembagaan berbagai jenis kegiatan oprasional sehingga nyata jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang melakukan apa?”; (3) Berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi sebagai jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan apa?”; (4) jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik yang sifatnya institusional maupun individual; (5) hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lain. Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures/SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal demikian pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel

Sedangkan komponen-komponen dalam kebijakan menurut Nasiri (2012) tersebut adalah : (1) Kebijakan publik, (2) Tuntutan kebijakan, (3) Keputusan kebijakan, (4) Pertanyaan kebijakan, (5) Hasil kebijakan. Karena setidaknya ada dua (2) hal mengapa implementasi kebijakan pemerintah memiliki relevansi: (1) Secara praktis akan memberikan masukan bagi pelaksanaan operasional program

sehingga dapat dideteksi apakah program telah berjalan sesuai dengan yang telah

dirancang serta mendeteksi kemungkinan tujuan kebijakan negative yang ditimbulkan, (2) Memberikan alternative model pelaksanaan program yang lebih efektif.

Berdasarkan pandangan yang diutarakan di atas dapat disimpulkan, bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat akhirnya berpengaruh terhadap tujuan kebijakan, baik yang negative maupun yang positif.

Dengan demikian secara sederhana tujuan implementasi kebijakan Program Bedah Rumah adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Selanjutnya Ferlie (2014) menyatakan bahwa bahwa keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa mulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Dengan telah diimplementasikannya Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang tersebut, tentunya membawa dampak terhadap peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, di mana keberhasilan tugas-tugas pemerintahan daerah Kabupaten Deli Serdang sangat tergantung dari keberhasilan dan kinerja dari Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan tentang Implementasi Program Bedah Rumah Studi di Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut :

- 1) Implementasi Program Bedah Rumah Studi di Kabupaten Deli Serdang yang dilihat dari aspek komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan dan struktur birokrasi, telah berjalan dengan baik dalam arti bahwa implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang tersebut telah berjalan secara telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan. Selama tahun 2011-2013 telah dilakukan rehabilitasi sebanyak 1.132 Rumah Tidak Layak Huni melalui Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang.
- 2) Hambatan utama yang masih ditemukan dalam Implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang adalah berkaitan dengan masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk mendukung program ini, menyebabkan upaya percepatan pembangunan dan renovasi rumah warga kurang mampu dilakukan secara bertahap. Di samping itu masih terdapat beberapa rumah warga yang tidak layak huni, tetapi tidak memiliki Surat Kepemilikan Hak Atas Tanah.

6.2. Saran - saran

Untuk lebih meningkatkan tingkat keberhasilan ram Implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang dan guna mengatasi berbagai hambatan yang dijumpai di lapangan, perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang perlu dilanjutkan pada bidang peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman.
- 2) Mengembangkan hubungan yang lebih sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E., 1975, *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abidin, Zainal.S. 2006. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Suara Bebas
- Angel Saz-Carranza and Sonia M. Ospina, 2011. "The Behavioral Dimension of Governing Interorganizational Goal-Directed Networks—Managing the Unity-Diversity Tension". *Journal of Public Administration Research and Theory* Volume 21, Number 2 , April 2011.
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/jopart/impactfactor.html. (22 Maret 2014)
- Dye, Thomas R. 1978. *Understanding Public Analisis: an Intoduction*, Second Edition (terjemahan), Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press,
- Dunn, William N. 1998. Muhadjir Darwin (Penyunting). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, George C, 1980, *Implementing Public Policy*, Prentice-Hall, New Jersey.
- Ferlie, Ewan; McGivern, Gerry , 2014. "Bringing Anglo-Governmentality into Public Management Scholarship: The Case of Evidence-based Medicine in UK Health Care". *Journal of Public Administration Research and Theory* , Volume 24 (1) – Jan 1, 2014.
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/jopart/impactfactor.html. (22 Maret 2014)
- Grindle, Merilee S., 1980, *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- Hidayat, Syarifuddin, 2000, *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Meter, Donald S. van dan Horn, Carl E. van, 1975, *The Policy Implementation Process: A Conseptual Framework*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Mustopadidjaya AR. (2002), *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta:LAN
- Nugroho D, Riant, 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Purwanto, Erwan Agus & Dyah Ratih Sulistiyatutu, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Singarimbun, Masri, 1995, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Hadi, 2001, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran George Edwards*. Yogyakarta: YPAPI.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: YPAPI.
- Wahab, Abdul, 1991. *Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samoedra, 2004. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

**IMPLEMENTASI PROGRAM BEDAH RUMAH
DI KABUPATEN DELI SERDANG**

=====

A. PENGANTAR

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dengan judul “Implementasi Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang ”, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktunya guna menjawab pertanyaan-pertanyaan pada daftar ini tanpa prasangka dan perasaan tertekan.

Semua keterangan dan jawaban yang kami peroleh semata-mata untuk kepentingan penelitian dan dijamin kerahasiaannya. Keterangan dan jawaban yang Bapak/Ibu berikan besar sekali artinya untuk kelancaran penelitian yang pada akhirnya akan dapat bermanfaat bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Bapak/Ibu.

Atas bantuan Bapak/Ibu Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih dan semoga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Terima kasih.

Peneliti,

Feri Sepnanda Ginting

LAMPIRAN

B. KARAKTERITIK RESPONDEN

1. No. Responden :
2. Umur :.....Tahun
3. Jenis Kelamin : (1) Laki-laki (2) Perempuan
4. Pendidikan : (1) Tamat SD
(2) Tamat SLTP
(3) Tamat SLTA
(4) Akademi/Perguruan Tinggi
5. Kedudukan dalam Program sebagai

C. VARIABEL PENELITIAN

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara jelas tentang Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang ?
 - (a) Mengetahui
 - (b) Kurang Mengetahui
 - (c) Tidak Mengetahui
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara jelas tentang tujuan/sasaran program Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang ?
 - (a) Mengetahui
 - (b) Kurang mengetahui
 - (c) Tidak mengetahui
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara jelas tentang adanya perangkat aturan dalam palaksanaan Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang ?
 - (a) Mengetahui
 - (b) Kurang mengetahui
 - (c) Tidak mengetahui
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya peraturan yang mengatur secara tertulis tentang pelaksanaan program Program Bedah Rumah di Kabupaten Deli Serdang ?
 - (a) Mengetahui
 - (b) Kurang mengetahui
 - (c) Tidak mengetahui